

**KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK DALAM
MANAJEMEN OPERASIONAL KEUANGAN PT KERETA API
INDONESIA**

Disusun Oleh :

NAMA : ABID SETIAWAN
NPM : 2143021028
JURUSAN : ADMINISTRASI PEMBANGUNAN NEGARA
PROGRAM STUDI : ADMNISTRASI PEMBANGUNAN NEGARA
KONSENTRASI : MANAJEMEN KEUANGAN NEGARA

Tesis diajukan untuk memenuhi syarat guna memperoleh gelar

Magister Terapan Administrasi Publik (M.Tr.Ap)



**POLITEKNIK
STIA LAN
J A K A R T A**

LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA
POLITEKNIK STIA LAN JAKARTA
PROGRAM MAGISTER TERAPAN

TAHUN 2024

LEMBAR PERSETUJUAN

PROGRAM STUDI APN MAGISTER TERAPAN

POLITEKNIK STIA LAN JAKARTA

LEMBAR PERSTUJUAN TESIS

NAMA : ABID SETIAWAN

NPM : 2143021028

JURUSAN : ADMINISTRASI PUBLIK

PROGRAM STUDI : ADMINISTRASI PEMBANGUNAN NEGARA

KONSENTRASI : MANAJEMEN KEUANGAN NEGARA

JUDUL TESIS (Bahasa Indonesia) :

KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK DALAM MANAJEMEN
OPERASIONAL KEUANGAN PT KERETA API INDONESIA

JUDUL TESIS (Bahasa Inggris)

*OPEN PUBLIC INFORMATION IN FINANCE OPERATIONAL
MANAGEMENT PT KERETA API INDONESIA*

Diterima dan Distujui untuk dipertahankan Pembimbing Tesis

Pembimbing I



(Arifiani Widjayanti, Msi, Ph.D)

Pembimbing II



(Prof, Dr. Nurliah Nurdin, MA)

LEMBAR PENGESAHAN

PROGRAM STUDI APN MAGISTER TERAPAN

POLITEKNIK STIA LAN JAKARTA

LEMBAR PENGESAHAN TESIS

NAMA : ABID SETIAWAN

NPM : 2143021028

JURUSAN : ADMINISTRASI PUBLIK

PROGRAM STUDI : ADMINISTRASI PEMBANGUNAN NEGARA

KONSENTRASI : MANAJEMEN KEUANGAN NEGARA

**JUDUL TESIS : KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK
DALAM MANAJEMEN OPERASIONAL
KEUANGAN PT KERETA API INDONESIA**

Telah mempertahankan tesis di hadapan penguji tesis Program Magister Terapan Administrasi Pembangunan Negara, Politeknik STIA LAN Jakarta, Lembaga Administrasi Negara, Pada

Hari : Jumat

Tanggal : 19 Juli 2024

Pukul : 13.00 s.d 14.30

TELAH DINYATAKAN LULUS PENGUJI TESIS.

Ketua Sidang : Dr. Edy Sutrisno, M.Si

Sekretaris : Dr. Hamka, MA

Anggota : Prof. Dr. R Luki Karunia, MA

Pembimbing 1 : Arifiani Widjayanti, Msi, Ph.D

Pembimbing 2 : Prof, Dr. Nurliah Nurdin, MA



LEMBAR PERNYATAAN ORIGINALITAS TUGAS AKHIR

Saya yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : Abid Setiawan
NPM : 2143021028
Jurusan : Administrasi Publik
Program Studi : Administrasi Pembangunan Negara
Konsentrasi : Manajemen Keuangan Negara

Dengan ini menyatakan bahwa penelitian Tugas Akhir Tesis yang telah saya buat dengan judul ‘Keterbukaan Informasi Publik Dalam Manajemen Operasional Keuangan PT Kereta Api Indonesia’ merupakan hasil karya sendiri dan benar keasliannya. Apabila dikemudian hari penulisan tugas akhir ini merupakan hasil plagiat atau penjiplakan terhadap karya orang lain, maka saya bersedia mempertanggungjawabkan sekaligus menerima sanksi berdasarkan aturan dan ketentuan yang berlaku di Politeknik STIA Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia

Jakarta, 19 Juli 2024

Yang membuat pernyataan



Abid Setiawan

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah mari kita panjatkan puji serta Syukur kehadiran Allah SWT yang telah memberikan kekuatan serta keyakinan kepada peneliti sehingga mampu menyelesaikan tesis dengan judul “Keterbukaan Informasi Publik Dalam Manajemen Operasional PT Kereta Api Indonesia”. Tesis ini disusun sebagai salah satu syarat dalam memperoleh gelar Magister Terapan Administrasi Publik (M.Tr.A.P) pada program pascasarjana (S2) Magister Administrasi Publik Politeknik STIA LAN Jakarta. Penyusunan tesis ini juga dimaksudkan untuk memberikan kontribusi dalam pengembangan Ilmu Manajemen Keuangan Negara khususnya dalam Keterbukaan Informasi Publik Dalam Manajemen Operasional PT Kereta Api Indonesia.

Dalam proses penyusunan tesis ini, peneliti banyak mendapatkan bimbingan yang sangat membantu dari Ibu Arifiani Widjayanti, Msi, Ph.D dan Prof, Dr. Nurliah Nurdin, MA, selaku Dosen Pembimbing Satu dan Dosen Pembimbing Kedua dengan penuh kesabaran dan dedikasi yang tinggi untuk membantu peneliti menyelesaikan tesis ini. Penelitian ini juga dapat terselesaikan dengan baik berkat bantuan dari banyak pihak, Oleh karenanya peneliti dalam kesempatan ini juga berterima kasih kepada pihak-pihak yang membantu menyelesaikan tesis ini, khususnya kepada :

1. Ibu Prof, Dr. Nurliah Nurdin, MA, Selaku Direktur STIA LAN Jakarta sekaligus dosen pembimbing kedua yang telah memberikan saran dan perbaikan tesis ini menjadi lebih baik
2. Ibu Arifiani Widjayanti, Msi, Phd. Dosen Pembimbing Kedua yang telah memberikan saran dan perbaikan pada tesis ini menjadi lebih baik
3. Teman-Teman di Keuangan dan Tim Legal Hukum yang memberikan Semangat untuk terus Berkuliah
4. Bapak Edwin Aldryanto selaku Manajer Keuangan PT Kereta Api Indonesia yang telah memberikan kesempatan bagi penulis untuk wawancara

5. Bapak Dwi Sunarto Selaku Asisten Manajer Keuangan PT Kereta Api Indonesia yang telah memberikan kesempatan bagi penulis untuk wawancara
6. Ibu Sumihati Selaku Asisten Manajer Anggaran PT Kereta Api Indonesia yang telah memberikan kesempatan bagi penulis untuk wawancara
7. Ibu Yuni Selaku Asistant Manajer Perpajakan PT Kereta Api Indonesia yang telah memberikan kesempatan bagi penulis untuk wawancara
8. Ibu Diah Pranata Selaku Asisten Manajer Akutansi yang telah memberikan kesempatan bagi penulis untuk wawancara
9. Bapak Andy Cristiyanto Selaku Asisten Manajer Penagihan yang telah memberikan kesempatan bagi penulis untuk wawancara
10. Alm Ayah, Ayahku terimakasih selalu memberikan semangat kepada anaknya sehingga kuat sampai dengan sekarang untuk menyelesaikan Kuliah
11. Ibu, terimakasih yang selalu memberikan semangat berkuliah S2 di STIA LAN Jakarta
12. Adikku yang selalu memberikan semangat kepada Kakaknya untuk berkuliah

Peneliti menyadari tesis ini masih jauh dari sempurna, namun peneliti berharap tesis ini mampu memberikan manfaat bagi setiap orang yang membacanya. Semoga Allah SWT memberikan Rahmat dan Hidayahnya untuk kita semua, Amin YRA.

Jakarta, 19 Juli 2024

Peneliti



Abid Setiawan

ABSTRAKSI

Keterbukaan Informasi Publik Dalam Manajemen Operasional Keuangan PT Kereta Api Indonesia

Abid Setiawan, Arifiani Widjayanti, Nurliah Nurdin

2143021028@stialan.ac.id

Politeknik STIA LAN Jakarta

Penelitian ini bertujuan untuk Menganalisis Mengapa Keterbukaan Informasi Dalam Manajemen Operasional Keuangan PT Kereta Api Indonesia belum optimal & Menyusun Strategi dalam Rangka Keterbukaan Informasi Publik Dalam Manajemen Operasional PT Kereta Api Indonesia Metode Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini ada kualitatif deskriptif dengan menggunakan Teknik pengumpulan data wawancara, observasi dan dokumentasi. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa terjadi permasalahan Keterbukaan Informasi Publik Manajemen Operasional Keuangan PT Kereta Api Indonesia Belum Optimal, Strategi Keterbukaan Informasi Publik Dalam Manajemen Operasional Keuangan PT Kereta Api Indonesia Berdasarkan hasil temuan yang sudah disebutkan sebelumnya maka saran yang sekiranya dapat diberikan peneliti adalah sebagai berikut : Harus ada evaluasi terhadap struktur organisasi dan pembagian tanggung jawab manajemen untuk terlaksananya perencanaan dan pengendalian yang efektif Tentang Keterbukaan Informasi Publik Manajemen Operasional Keuangan PT Kereta Api Indonesia yang Optimal, Harus ada evaluasi dan reorganisasi sistem akuntansi untuk manajemen bahwa sistem tersebut harus sesuai dengan tanggung jawab Perusahaan sehingga sistem ini menjadi data yang berguna untuk perencanaan dan pengendalian dengan adanya Strategi maka Keterbukaan Informasi Publik Manajemen Keuangan PT Kereta Api Indonesia bisa Berjalan Dengan Optimal.

ABSTRACT

OPPENESS PUBLIC INFORMATION IN FINANCE OPERATIONAL MANAGEMENT PT KERETA API INDONESIA

Abid Setiawan, Arifiani Widjayanti, Nurliah Nurdin

2143021028@stialan.ac.id

Politeknik STIA LAN Jakarta

This research aims to analyze why information disclosure in the financial operational management of PT Kereta Api Indonesia is not yet optimal & develop strategies for public information disclosure in the operational management of PT Kereta Api Indonesia. The research method used in this research is qualitative descriptive using interview data collection techniques, observation and documentation. The results of the research show that there is a problem of openness of public information in the financial operational management of PT Kereta Api Indonesia which is not yet optimal. The strategy for public information openness in the financial operational management of PT Kereta Api Indonesia. Based on the findings mentioned previously, the suggestions that researchers can give are as follows: Must there is an evaluation of the organizational structure and division of management responsibilities for the implementation of effective planning and control. Concerning Public Information Openness Optimal Financial Operational Management of PT Kereta Api Indonesia, there must be an evaluation and reorganization of the accounting system for management so that the system must be in accordance with the Company's responsibilities so that This system becomes useful data for planning and control. With the existence of a strategy, the Public Information Openness of PT Kereta Api Indonesia's financial management can run optimally.

DAFTAR ISI

LEMBAR JUDUL.....	I
LEMBAR PERNYATAAN ORGINALITAS.....	II
LEMBAR PERSETUJUAN TESIS.....	III
LEMBAR PENGESAHAN TESIS.....	IV
KATA PENGANTAR.....	V
ABSTRAKSI.....	VI
ABSTRACT	VII
DAFTAR ISI.....	VIII
DAFTAR TABEL	IX
DAFTAR GAMBAR.....	X
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. LATAR BELAKANG MASALAH.....	1
B. IDENTIFIKASI MASALAH.....	22
C. RUMUSAN PERMASALAHAN.....	23
D. TUJUAN PENELITIAN.....	23
E. MANFAAT PENELITIAN.....	24
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	25
A. PENELITIAN TERDAHULU.....	25
B. TINJAUAN KEBIJAKAN DAN TEORITIS.....	32
1. TINJAUAN KEBIJAKAN.....	33
2. TINJAUAN TEORITIS.....	36
2.1 KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK PT. KERETA API INDONESIA.....	36
C. KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK DAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 61 TAHUN 2010 TENTANG PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK.....	47
D. INDIKATOR KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK DAN TRANSPARANSI.....	48
E. FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK.....	50
F. KERANGKA BERPIKIR.....	55

BAB III METODOLOGI PENELITIAN.....	56
A. METODE PENELITIAN.....	56
B. TEKNIK PENGUMPULAN DATA.....	57
1. INTERVIEW/WAWANCARA.....	57
2. OBSERVASI.....	58
3. METODE TELAHAH DOKUMEN.....	58
C. TEKNIK PENGELOLAHAN DAN ANALISIS DATA.....	58
1. TEKNIK PENGOLAHAN.....	58
1.1 WAWANCARA.....	58
1.2 OBSERVASI.....	59
1.3 DOKUMENTASI.....	59
2. ANALISIS DATA.....	59
1.1 PENGUMPULAN DATA.....	59
1.2 REDUKSI DATA.....	59
1.3 PENYAJIAN DATA.....	59
1.4 PENARIKAN KESIMPULAN DAN VERFIKASI.....	60
D. PROSEDUR VALIDASI MODEL.....	61
E. INSTRUMEN PENELITIAN.....	61
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.....	62
A. GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN.....	62
1. SEJARAH PT KERETA API INDONESIA.....	62
2. DINAMIKA PELAYANAN PT KERETA API INDONESIA.....	63
3. STRUKTUR ORGANISASI PT KERETA API INDONESIA.....	70
B. TUGAS, POKOK DAN FUNGSI.....	71
C. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	73
1. Identifikasi dini kekuatan dan kelemahan.....	74
2. Akuntabilitas Pemerintah.....	81
3. Transparansi.....	84
4. Iklim Investasi.....	89
D. Strategi Optimalisasi Keterbukaan Informasi Publik PT Kereta Api Indonesia.....	95
E. Strategi Keterbukaan Informasi Publik Dalam Manajemen Operasional Keuangan PT Kereta Api Indonesia.....	98

BAB 5 KESIMPULAN DAN SARAN.....	105
A. KESIMPULAN.....	105
B. SARAN.....	106



**POLITEKNIK
STIA LAN
J A K A R T A**

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Kerangka Berpikir.....55



**POLITEKNIK
STIALAN
J A K A R T A**

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Standar Operasional Prosedur Keterbukaan Informasi Publik PT. Kereta Api Indonesia.....	33
Gambar 1.2 Matthew B.Milles, A.Michael Hubberman dan Johny Saldana.....	60
Gambar 1.3 Struktur Organisasi PT Kereta Api Indonesia.....	70
Gambar 1.4 Strategi Keterbukaan Informasi Publik PT Kereta Api Indonesia.....	98
Gambar 1.5 Layanan Informasi Publik PT Kereta Indonesia.....	98



POLITEKNIK
STIALAN
J A K A R T A

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG MASALAH

PT Kereta Api Indonesia (Persero) yang selanjutnya disingkat sebagai PT. KAI (Persero) atau “Perseroan” adalah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang menyediakan, mengatur, dan mengurus jasa angkutan kereta api di Indonesia. PT. KAI (Persero) mempunyai visi yaitu “Menjadi Penyedia Jasa Perkeretaapian Terbaik Yang Fokus Pada Pelayanan Pelanggan Dan Memenuhi Harapan *Stakeholders*”. yang selanjutnya disingkat sebagai sudah menjadi Alat transportasi menjadi transportasi yang membantu peradaban manusia. (Tanliziduhu Ndraha 2011:222).

Pentingnya Keterbukaan Informasi Publik merupakan prinsip dasar dalam tata kelola perusahaan yang baik (*good corporate governance*). Keterbukaan informasi memungkinkan pemangku kepentingan (*stakeholders*) seperti pemegang saham, pelanggan, pemerintah, dan masyarakat umum untuk memahami secara transparan bagaimana PT Kereta Api Indonesia mengelola operasional keuangannya. Ini penting dalam memastikan akuntabilitas perusahaan dan mencegah praktik-praktik yang merugikan. Sabatier, Paul (2005).

Tingkat Minat Publik PT Kereta Api Indonesia adalah perusahaan milik negara yang memberikan layanan transportasi publik yang penting bagi masyarakat. Karena itu, minat publik terhadap informasi mengenai kebijakan, anggaran, dan kinerja keuangan perusahaan ini sangat tinggi. Penelitian ini dapat mengukur tingkat minat dan ekspektasi publik terhadap keterbukaan informasi dari PT Kereta Api Indonesia. Suharsimi (2010:3).

Dampak Keterbukaan Informasi Terhadap Keuangan dan Reputasi Keterbukaan informasi publik dapat memiliki dampak langsung terhadap citra perusahaan dan keuangan. Penelitian ini dapat mengkaji apakah praktik keterbukaan informasi yang baik memiliki korelasi positif dengan performa keuangan PT. Kereta Api Indonesia, serta apakah hal ini mempengaruhi persepsi

dan reputasi perusahaan di mata pemegang saham dan masyarakat. Harfied Cangara (2011:77).

Perbandingan dengan Praktik Terbaik Penelitian ini juga bisa membandingkan praktik keterbukaan informasi PT Kereta Api Indonesia dengan praktik terbaik dalam industri transportasi dan perusahaan-perusahaan sejenis di dunia. Hal ini dapat memberikan pandangan lebih luas tentang potensi perbaikan yang dapat dilakukan oleh PT Kereta Api Indonesia. Nafarin (2013:15).

Keterbukaan informasi publik adalah prinsip yang sangat penting dalam sebuah masyarakat demokratis. Prinsip ini mengacu pada kewajiban pemerintah dan lembaga publik untuk menyediakan informasi yang relevan dan penting kepada masyarakat secara terbuka dan transparan. Ini adalah aspek penting dalam menjaga akuntabilitas pemerintah, mencegah penyalahgunaan kekuasaan, dan memastikan partisipasi aktif warga dalam proses pengambilan keputusan. M Fuad dkk (2020:16).

Untuk mencapai keterbukaan informasi publik, pemerintah dan lembaga publik seharusnya Conelis Lay (2006):

- Mengedepankan Hak Akses Informasi: Masyarakat memiliki hak untuk mengakses informasi yang diproduksi atau dipegang oleh pemerintah atau lembaga publik.
- Memublikasikan Informasi yang Relevan: Informasi yang penting untuk masyarakat seharusnya dipublikasikan secara rutin. Ini bisa termasuk anggaran pemerintah, data kesehatan, data pendidikan, kontrak pemerintah, dan banyak lagi.
- Menggunakan Teknologi: Memanfaatkan teknologi informasi untuk membuat informasi lebih mudah diakses oleh masyarakat. Ini bisa berarti memiliki situs web resmi yang memberikan akses ke data publik, aplikasi ponsel, atau alat lainnya.
- Transparansi dalam Pengambilan Keputusan: Masyarakat seharusnya memiliki pemahaman yang jelas tentang bagaimana keputusan dibuat. Hal

ini mencakup proses pengambilan keputusan, pemangku kepentingan yang terlibat, dan dasar-dasar keputusan tersebut.

- Melibatkan Masyarakat: Keterbukaan informasi publik juga berarti mendengarkan umpan balik dan kontribusi dari masyarakat dalam proses pembuatan keputusan.
- Perlindungan Informasi Pribadi: Meskipun penting untuk menjadi terbuka, informasi pribadi individu seharusnya dilindungi dan dirahasiakan sesuai dengan hukum yang berlaku.
- Hukum tentang Keterbukaan Informasi Publik: Seringkali, ada undang-undang atau peraturan yang mengatur keterbukaan informasi publik. Ini harus ditegakkan dan ditaati.

Keterbukaan informasi publik memainkan peran penting dalam menjaga akuntabilitas pemerintah, mendukung kebebasan pers, dan memungkinkan warga negara untuk membuat keputusan yang lebih baik. Oleh karena itu, prinsip ini adalah salah satu pilar penting dalam demokrasi yang sehat. Di era reformasi sekarang ini, keterbukaan informasi publik merupakan aspek yang tidak terpisahkan dari demokrasi yang menjunjung kebebasan dan hak asasi manusia, keterbukaan dan hak asasi manusia, keterbukaan informasi menjadi penting dalam hal pemenuhan informasi publik. Informasi merupakan sebuah kebutuhan yang harus terpenuhi setiap orang. Kebutuhan akan informasi yang harus terpenuhi setiap orang. Kebutuhan akan informasi yang semakin hari semakin meningkat dapat dilihat dari semakin banyaknya orang mengakses informasi baik bersumber dari media cetak, media elektronik, dan lain-lain. Informasi bisa berupa pernyataan, gagasan, dan tanda tangan yang mengandung nilai, makna, dan pesan, baik data, fakta maupun penjelasannya yang dapat dilihat, didengar, dan dibaca yang disajikan dalam berbagai kemasan secara elektronik maupun non elektronik. Herawati, Dewi Marheni Diah, (2003).

Saat ini kebutuhan masyarakat terhadap keterbukaan informasi publik sangat penting untuk diperhatikan, perkembangan teknologi informasi memudahkan masyarakat untuk memperoleh informasi publik. Selain itu juga membantu pemerintah untuk memperbaiki sistem informasi dalam pemenuhan kebutuhan informasi publik. Setiap orang dengan tingkat kemampuan yang berbeda-beda akan menentukan seberapa baik hasil dari informasi yang ditemukan atau produk informasi yang dihasilkan untuk mendapatkan informasi yang tepat sesuai kebutuhannya, maka dari itu, pemerintah akan dituntut untuk selalu melakukan perubahan dalam memberikan informasi yang transparan kepada publik. Ana Nadhya Abrar (2008).

Untuk mendorong informasi publik maka lahirnya UU Nomor 14 Tahun 2008, Keterbukaan Informasi Publik yang disahkan DPR RI pada tanggal 3 April 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik mendorong badan publik memberikan informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola atau diterima suatu badan publik berkaitan dengan penyelenggaraan Negara yang intinya memberikan informasi yang dihasilkan penyelenggaraan Negara yang intinya memberikan kewajiban kepada publik untuk mendapatkan informasi publik guna meningkatnya peran serta partisipasi masyarakat untuk mewujudkan penyelenggaraan proses pengambilan kebijakan publik serta meningkatkan peran aktif masyarakat dalam pengambilan kebijakan publik dan pengelolaan badan publik yang baik. Sahya Anggara (2012).

Keterbukaan informasi publik adalah prinsip yang mendorong pemerintah dan lembaga publik untuk memberikan akses yang mudah dan transparan kepada informasi yang mereka miliki kepada masyarakat. Ini adalah bagian penting dari sistem demokratis, karena memungkinkan warga negara untuk memahami lebih baik cara pemerintah mereka beroperasi, membuat keputusan yang lebih baik, dan memantau tindakan pemerintah untuk memastikan akuntabilitas dan menghindari korupsi. Natascha Sorenchen (2012).

Berikut adalah beberapa aspek penting dari keterbukaan informasi publik Arrie Halachmie (2004):

- **Akses Informasi:** Pemerintah dan lembaga publik harus memberikan akses yang mudah kepada informasi yang mereka miliki. Ini bisa termasuk laporan keuangan, kebijakan publik, data statistik, dan informasi lainnya yang relevan.
- **Transparansi:** Informasi harus disediakan dengan cara yang mudah dimengerti dan tidak disembunyikan atau disusahkan. Hal ini memungkinkan masyarakat untuk memahami dan mengkritik tindakan pemerintah.
- **Hak Asasi Manusia:** Keterbukaan informasi publik juga dapat berhubungan dengan hak asasi manusia, memastikan bahwa informasi yang berkaitan dengan kebebasan, keadilan, dan keamanan warga negara disediakan dengan tepat.
- **Perlindungan Data Pribadi:** Meskipun penting untuk memberikan akses informasi, penting juga untuk melindungi data pribadi dan informasi yang sensitif. Oleh karena itu, ada kebutuhan untuk menjaga keseimbangan antara keterbukaan dan privasi.
- **Undang-Undang dan Peraturan:** Banyak negara memiliki undang-undang dan peraturan yang mengatur keterbukaan informasi publik. Ini mungkin termasuk hukum yang mengatur klasifikasi informasi dan prosedur pengajuan permohonan informasi.
- **Akuntabilitas:** Keterbukaan informasi publik membantu menciptakan akuntabilitas pemerintah. Ketika tindakan pemerintah terbuka untuk pemeriksaan publik, pemerintah lebih mungkin bertanggung jawab atas tindakannya.
- **Partisipasi Masyarakat:** Keterbukaan informasi juga memungkinkan partisipasi aktif masyarakat dalam proses pembuatan keputusan. Dengan akses yang baik ke informasi, masyarakat dapat berkontribusi pada perubahan dan perbaikan dalam tindakan pemerintah.

- Pendidikan Publik: Keterbukaan informasi juga melibatkan pendidikan publik tentang pentingnya akses dan pemahaman terhadap informasi tersebut.

Keterbukaan informasi publik adalah prinsip yang penting dalam sistem demokratis dan pemerintahan yang baik. Ini membantu menjaga keseimbangan kekuasaan antara pemerintah dan masyarakat, serta memastikan bahwa kebijakan dan tindakan pemerintah dapat diawasi secara efektif oleh masyarakat Abrogast, Stephen V (2008).

- Keterbukaan informasi publik memiliki banyak kelebihan yang penting dalam konteks masyarakat, pemerintahan, dan ekonomi. Berikut adalah beberapa kelebihan keterbukaan informasi publik.
- Akuntabilitas Pemerintah: Keterbukaan informasi publik membantu menjaga pemerintah dan pejabat publik tetap akuntabel. Ketika informasi tentang tindakan pemerintah dan pengeluaran diberikan kepada masyarakat, masyarakat dapat mengawasi dan menilai apakah pemerintah telah bertindak dengan benar dan efisien.
- Partisipasi Demokratis: Keterbukaan informasi publik memungkinkan masyarakat untuk berpartisipasi dalam proses politik dan pengambilan keputusan. Masyarakat yang terinformasi dengan baik dapat lebih baik memilih pemimpin mereka dan memberikan masukan pada kebijakan publik.
- Pengawasan Hukum: Keterbukaan informasi memainkan peran penting dalam sistem hukum. Informasi yang tersedia untuk publik memungkinkan pengawasan hukum yang lebih baik, memungkinkan kasus-kasus penyalahgunaan kekuasaan atau pelanggaran hukum lainnya untuk diungkap dan ditindaklanjuti.
- Peningkatan Efisiensi: Keterbukaan informasi publik juga dapat meningkatkan efisiensi dalam sektor publik. Informasi yang tersedia kepada semua pihak, termasuk pemerintah, dapat membantu mengidentifikasi masalah dan peluang untuk meningkatkan penyediaan layanan publik dan mengelola sumber daya secara lebih efisien.

- **Inovasi dan Pengembangan Ekonomi:** Keterbukaan informasi publik memungkinkan perusahaan dan individu untuk mengakses data yang mereka butuhkan untuk inovasi dan pengembangan ekonomi. Ini dapat menciptakan peluang baru untuk bisnis, penelitian, dan pengembangan teknologi.
- **Transparansi Keuangan:** Keterbukaan informasi publik dapat membantu mencegah korupsi dan penyalahgunaan dana publik. Ketika informasi tentang anggaran, pengeluaran, dan transaksi keuangan pemerintah tersedia untuk umum, lebih mudah untuk mendeteksi tindakan yang mencurigakan.
- **Pemberdayaan Individu:** Keterbukaan informasi publik memberdayakan individu dengan pengetahuan dan akses ke informasi yang mereka butuhkan untuk membuat keputusan yang baik dalam kehidupan mereka, seperti dalam pendidikan, kesehatan, dan keuangan.
- **Perbaikan Layanan Publik:** Dengan informasi yang tersedia untuk masyarakat, layanan publik dapat ditingkatkan berdasarkan umpan balik dan kebutuhan masyarakat. Ini dapat membantu meningkatkan kualitas hidup dan kepuasan masyarakat.
- **Pembangunan Berkelanjutan:** Keterbukaan informasi publik dapat mendukung pembangunan berkelanjutan dengan memungkinkan akses ke data lingkungan dan informasi yang diperlukan untuk mengelola sumber daya alam secara berkelanjutan.
- **Mencegah Penyalahgunaan Kekuasaan:** Dengan memungkinkan akses terbuka terhadap informasi, keterbukaan juga dapat mengurangi risiko penyalahgunaan kekuasaan oleh pihak-pihak yang memiliki akses terhadap informasi tersebut.

Kesimpulannya, keterbukaan informasi publik memiliki banyak kelebihan yang penting untuk menjaga masyarakat yang demokratis, akuntabel, dan berkelanjutan, serta membantu mencegah penyalahgunaan kekuasaan.

Keterbukaan informasi publik adalah prinsip penting dalam pemerintahan demokratis. Namun, seperti halnya dengan segala sesuatu, ada kekurangan yang terkait dengan keterbukaan informasi publik. Berikut adalah beberapa kekurangan yang mungkin terjadi Basu,S.K (2009):

- **Keamanan Nasional:** Terlalu banyak keterbukaan informasi dapat membahayakan keamanan nasional suatu negara. Informasi yang terlalu rinci tentang kebijakan pertahanan, operasi militer, atau intelijen dapat dieksploitasi oleh pihak-pihak yang bermaksud jahat.
- **Privasi Individu:** Keterbukaan informasi publik dapat melanggar privasi individu jika data pribadi mereka tersedia untuk umum. Ini dapat berdampak negatif pada hak-hak individu dan menjadikan mereka rentan terhadap penyalahgunaan informasi pribadi.
- **Penggunaan Politik:** Informasi publik dapat digunakan secara politis untuk menghancurkan reputasi seseorang atau kelompok, bahkan jika informasi tersebut tidak benar atau diambil dari konteks. Hal ini dapat merusak karier dan reputasi tanpa bukti yang kuat.
- **Ketidaksetaraan Akses:** Tidak semua orang memiliki akses yang sama terhadap informasi publik. Orang-orang dengan akses terbatas ke internet atau pendidikan yang terbatas mungkin merasa terpinggirkan dalam masyarakat yang mendorong keterbukaan informasi.
- **Kelemahan dalam Pengelolaan Informasi:** Terlalu banyak informasi publik yang tidak dikelola dengan baik dapat membingungkan dan membebani pemerintah serta organisasi lain yang harus mengurusnya. Hal ini dapat mengarah pada pemborosan sumber daya.
- **Perlindungan Bisnis:** Informasi publik yang terlalu rinci tentang bisnis atau kekayaan intelektual mereka dapat disalahgunakan oleh pesaing atau peniru, merugikan inovasi dan pertumbuhan ekonomi.
- **Ancaman terhadap Kebebasan Berbicara:** Dalam upaya untuk memastikan keterbukaan informasi, ada risiko potensial dari sensor media dan penindasan kebebasan berbicara.

- Pengaruh Opini Publik: Terlalu banyak informasi yang tersedia untuk umum dapat membingungkan dan memengaruhi opini publik dengan cara yang tidak sehat. Misalnya, tersebarinya informasi palsu atau konspirasi dapat memengaruhi persepsi masyarakat.
- Biaya dan Sumber Daya: Mengelola dan menjaga keterbukaan informasi publik memerlukan biaya dan sumber daya yang signifikan. Hal ini dapat membebani pemerintah dan organisasi yang harus memenuhi persyaratan transparansi.
- Penyalahgunaan Informasi: Informasi publik dapat disalahgunakan oleh kelompok ekstrem, teroris, atau entitas jahat lainnya untuk merencanakan tindakan kriminal atau terorisme.

Dalam merancang kebijakan keterbukaan informasi publik, penting untuk mencari keseimbangan antara transparansi dan perlindungan terhadap kepentingan nasional, privasi individu, dan keamanan sosial. Keterbukaan informasi yang bijak harus mempertimbangkan berbagai faktor ini untuk mencapai manfaat yang maksimal sambil mengurangi risiko dan dampak negatifnya Choi Fredrick D.S (2003).

Target keterbukaan informasi publik merujuk pada upaya pemerintah atau lembaga untuk meningkatkan akses masyarakat terhadap informasi yang mereka hasilkan atau kelola. Keterbukaan informasi publik adalah prinsip penting dalam demokrasi dan pemerintahan yang baik, karena memungkinkan warga negara untuk membuat keputusan yang lebih informasional dan berpartisipasi secara efektif dalam proses politik dan pengambilan keputusan. Target keterbukaan informasi publik dapat bervariasi antara negara dan lembaga, tetapi beberapa komponen umum termasuk Carnigie Garry (2006):

- Hukum Keterbukaan Informasi: Negara harus memiliki undang-undang yang mengatur akses warga negara terhadap informasi publik. Undang-undang ini harus mengatur jenis informasi yang dapat diakses, prosedur untuk mengajukan permintaan informasi, dan batasan yang sah terkait dengan keamanan nasional dan privasi.

- **Transparansi Anggaran:** Pemerintah harus memberikan informasi yang transparan tentang bagaimana uang pajak digunakan. Ini mencakup anggaran negara, pengeluaran, dan proyek-proyek publik.
- **Akses Terhadap Data Publik:** Warga negara harus dapat dengan mudah mengakses data dan dokumen publik, seperti laporan pemerintah, data statistik, dan kebijakan publik.
- **Kebebasan Pers:** Kebebasan media adalah elemen penting dari keterbukaan informasi publik, karena media independen memiliki peran kunci dalam mengungkapkan informasi yang penting untuk masyarakat.
- **Pelaporan Korupsi:** Keterbukaan informasi juga dapat mencakup upaya untuk melaporkan dan mengatasi korupsi, karena korupsi sering kali terkait dengan penyalahgunaan informasi dan kekuasaan.
- **Pelatihan dan Pendidikan:** Masyarakat perlu diberikan pelatihan dan pemahaman tentang pentingnya keterbukaan informasi publik, serta cara mengakses informasi dengan benar.

Tujuan dari target keterbukaan informasi publik adalah untuk memastikan bahwa pemerintah bertanggung jawab kepada rakyatnya, mendorong transparansi dalam pengambilan keputusan, mengurangi peluang untuk korupsi, dan memungkinkan masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembentukan kebijakan. Upaya untuk mencapai target ini akan berbeda-beda di setiap negara sesuai dengan kebijakan dan hukum yang berlaku Globe March (2003).

Keterbukaan informasi publik adalah prinsip yang penting dalam pemerintahan yang demokratis. Ini mengacu pada keterbukaan dan aksesibilitas informasi yang dimiliki oleh pemerintah atau institusi publik kepada masyarakat. Berikut adalah langkah-langkah untuk mempromosikan keterbukaan informasi publik Gledhill Johm (2004):

- **Adopsi Kebijakan Keterbukaan Informasi:** Pemerintah atau lembaga publik harus mengadopsi kebijakan yang mendorong dan mengamanatkan keterbukaan informasi publik sebagai prinsip dasar dalam pelayanan publik.

- **Pendefinisian Informasi Publik:** Tentukan apa yang dianggap sebagai "informasi publik." Ini harus mencakup hampir semua jenis informasi yang dihasilkan atau dikelola oleh pemerintah atau lembaga publik.

Pengembangan Undang-undang Keterbukaan Informasi: Membuat undang-undang yang jelas dan kuat yang mengatur keterbukaan informasi publik adalah langkah penting. Undang-undang ini harus memberikan wewenang kepada warga negara untuk mengakses informasi publik dan mengatur bagaimana proses permintaan informasi dilakukan Greenspan, Alan (2007).

- **Pengembangan Sistem Pengelolaan Informasi:** Pemerintah harus mengembangkan sistem yang efisien untuk mengumpulkan, menyimpan, dan mengelola informasi publik. Ini bisa termasuk basis data online atau portal keterbukaan informasi.
- **Penyediaan Informasi Aktif:** Pemerintah atau lembaga publik harus secara aktif menyediakan informasi yang penting dan berguna kepada masyarakat tanpa perlu diminta. Informasi ini dapat dipublikasikan secara rutin di situs web atau media lainnya.
- **Prosedur Permintaan Informasi:** Membuat prosedur yang jelas dan mudah diikuti untuk warga negara yang ingin mengajukan permintaan informasi. Ini harus mencakup formulir permintaan dan batas waktu untuk memberikan respons.
- **Perlindungan Privasi:** Pastikan perlindungan data pribadi dan informasi yang sensitif dalam konteks keterbukaan informasi. Terapkan kebijakan yang melindungi privasi individu.
- **Kesadaran dan Pendidikan:** Kampanye kesadaran masyarakat tentang hak-hak mereka dalam akses informasi publik sangat penting. Ini dapat mencakup pendidikan dan pelatihan mengenai bagaimana menggunakan hak tersebut.
- **Kepatuhan dan Penegakan Hukum:** Pastikan bahwa lembaga-lembaga publik mematuhi undang-undang keterbukaan informasi. Ini termasuk penegakan hukum jika ada pelanggaran.

- Evaluasi dan Pembaruan: Lakukan evaluasi berkala terhadap kebijakan keterbukaan informasi dan undang-undang yang ada, dan perbarui jika diperlukan untuk meningkatkan efektivitasnya.
- Keterbukaan informasi publik adalah prinsip yang mendukung akuntabilitas pemerintah, partisipasi warga negara, dan pemberdayaan masyarakat. Dengan mengikuti langkah-langkah ini, pemerintah dapat membangun fondasi yang kuat untuk keterbukaan informasi publik.
- Keterbukaan informasi publik adalah prinsip yang penting dalam pemerintahan yang demokratis. Ini mengacu pada keterbukaan dan aksesibilitas informasi yang dimiliki oleh pemerintah atau institusi publik kepada masyarakat. Berikut adalah langkah-langkah untuk mempromosikan keterbukaan informasi publik.
- Adopsi Kebijakan Keterbukaan Informasi: Pemerintah atau lembaga publik harus mengadopsi kebijakan yang mendorong dan mengamankan keterbukaan informasi publik sebagai prinsip dasar dalam pelayanan publik.

Pengembangan Undang-undang Keterbukaan Informasi: Membuat undang-undang yang jelas dan kuat yang mengatur keterbukaan informasi publik adalah langkah penting. Undang-undang ini harus memberikan wewenang kepada warga negara untuk mengakses informasi publik dan mengatur bagaimana proses permintaan informasi dilakukan. Lathrop, Daniel dan Ruma (2010).

- Pengembangan Sistem Pengelolaan Informasi: Pemerintah harus mengembangkan sistem yang efisien untuk mengumpulkan, menyimpan, dan mengelola informasi publik. Ini bisa termasuk basis data online atau portal keterbukaan informasi.
- Penyediaan Informasi Aktif: Pemerintah atau lembaga publik harus secara aktif menyediakan informasi yang penting dan berguna kepada masyarakat tanpa perlu diminta. Informasi ini dapat dipublikasikan secara rutin di situs web atau media lainnya.
- Prosedur Permintaan Informasi: Membuat prosedur yang jelas dan mudah diikuti untuk warga negara yang ingin mengajukan permintaan informasi.

Ini harus mencakup formulir permintaan dan batas waktu untuk memberikan respons.

- **Perlindungan Privasi:** Pastikan perlindungan data pribadi dan informasi yang sensitif dalam konteks keterbukaan informasi. Terapkan kebijakan yang melindungi privasi individu.
- **Kesadaran dan Pendidikan:** Kampanye kesadaran masyarakat tentang hak-hak mereka dalam akses informasi publik sangat penting. Ini dapat mencakup pendidikan dan pelatihan mengenai bagaimana menggunakan hak tersebut.
- **Kepatuhan dan Penegakan Hukum:** Pastikan bahwa lembaga-lembaga publik mematuhi undang-undang keterbukaan informasi. Ini termasuk penegakan hukum jika ada pelanggaran.
- **Evaluasi dan Pembaruan:** Lakukan evaluasi berkala terhadap kebijakan keterbukaan informasi dan undang-undang yang ada, dan perbarui jika diperlukan untuk meningkatkan efektivitasnya.

Keterbukaan informasi publik adalah prinsip yang mendukung akuntabilitas pemerintah, partisipasi warga negara, dan pemberdayaan masyarakat. Dengan mengikuti langkah-langkah ini, pemerintah dapat membangun fondasi yang kuat untuk keterbukaan informasi publik. Sejalan dengan derasnya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta arus globalisasi dimana masyarakat melakukan mobilitas secara cepat dan efisien, transportasi mempunyai peranan penting dalam mendukung pertumbuhan ekonomi, pengembangan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dewasa ini impian akan transportasi publik yang nyaman, dapat diandalkan di tengah padatnya kemacetan lalu lintas dengan biaya yang terjangkau masih sulit untuk diraih oleh masyarakat. Mermod A,Y.Sungun, G. (2013).

Terlebih di daerah kota-kota besar di pulau Jawa seperti kota Jakarta dan kota Surabaya. Antara kota Jakarta yang merupakan ibukota Indonesia dan Surabaya sebagai kota kedua terbesar dengan jarak 685 km selama ini dihubungkan dengan moda angkutan jalan, angkutan kereta api dan angkutan udara. Kebutuhan

akan transportasi semakin meningkat, untuk angkutan jalan memerlukan waktu lebih dari 18 jam. Demikian juga dengan angkutan kereta api, setidaknya diperlukan waktu 14 jam, sedangkan udara walaupun cepat namun tarifnya cukup tinggi (Media Kereta Api, 2010:39).

Salah satu alternatif yang banyak dipilih adalah kereta api, yang mampu mengangkut penumpang dan barang dalam jumlah besar dan massal, energi, hemat bahan dan mengurangi kemacetan. Dalam UU No. 23 tahun 2007 tentang Perkeretaapian dijelaskan, bahwa :

“Perkeretaapian sebagai salah satu moda transportasi dalam sistem transportasi nasional yang mempunyai karakteristik pengangkutan secara massal dan keunggulan tersendiri, yang tidak dapat dipisahkan dari moda transportasi lain, perlu dikembangkan potensinya, dan ditingkatkan peranannya sebagai penghubung wilayah, baik nasional maupun internasional, untuk menunjang, mendorong, dan menggerakkan pembangunan nasional guna meningkatkan kesejahteraan rakyat”.

Sebagaimana yang dijelaskan dalam UU No. 23 tahun 2007 tersebut di atas, kereta api sebagai moda angkutan umum yang diminati masyarakat diharapkan dapat mengurangi waktu tempuh antar kota dengan harga yang cukup terjangkau oleh masyarakat. Dengan kata lain, kereta api diharapkan dapat meningkatkan mobilitas penumpang antar kota dan mengurangi polusi udara yang diakibatkan oleh kendaraan bermotor. Oleh karena itu, PT. KAI mengembangkan kereta api kecepatan tinggi (*High Speed Train*) untuk menjawab tantangan tersebut.

Sebagaimana yang disampaikan oleh Bapak Hermanto Dwiatmoko selaku Direktur Keselamatan dan Teknik Sarana dalam Media Kereta Api (2010:39), bahwa dengan kereta api cepat ini diharapkan dapat meningkatkan mobilitas penumpang antara kedua kota dan kota-kota diantaranya, mengurangi polusi udara yang diakibatkan oleh kendaraan bermotor.

Namun, hingga kini kualitas layanan bagi pengguna jasa kereta api menjadi sorotan publik, kurangnya pemeliharaan sarana dan prasarana, terbatasnya gerbong dan infrastruktur, masalah kecelakaan kereta api, serta permasalahan lainnya. Selama ini, PT KAI cenderung mengejar kecepatan waktu untuk mengatasi jadwal keterlambatan yang banyak dikeluhkan konsumen, sehingga seringkali

mengabaikan sisi pelayanan dan keselamatan penumpang. Permasalahan ini menjadi tantangan utama bagi PT KAI untuk meningkatkan daya saingnya dengan sejumlah pasar transportasi yang lain dan sekaligus memberikan perlindungan kepada masyarakat dari aspek keamanan, kesehatan, keselamatan dan lingkungan (K3L) Markham J.W (2015).

Keterbukaan Informasi Publik sudah menjadi kebutuhan bagi Badan Publik, khususnya bagi Perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Menjalankan amanah Undang-Undang No.14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) tidak hanya sebagai kewajiban saja. Badan Publik BUMN, kini semakin sadar akan pentingnya Keterbukaan Informasi Publik untuk mewujudkan kepercayaan publik. Sebagai salah satu Badan Publik BUMN, PT Kereta Api Indonesia (Persero) atau KAI terus berkomitmen untuk melaksanakan Keterbukaan Informasi Publik dengan baik dengan berbagai program dan inovasi yang dijalankan guna menjadi Perusahaan yang semakin transparan dan terpercaya.

Selama kurun waktu tahun 2022, telah dilaksanakan program untuk mengoptimalkan teknologi informasi guna memudahkan masyarakat dalam memperoleh informasi dan proses pelayanan informasi publik, Pelayanan informasi publik yang berkualitas juga konsisten dilakukan kepada masyarakat yang membutuhkan informasi mengenai KAI. Namun proses pelayanan bukannya tanpa kendala. Berbagai cara terus dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut dalam rangka meningkatkan kualitas layanan informasi publik. Ridley, Jeffewy (2008).

Masalah utama terkait Keterbukaan Informasi Pengelolaan Keuangan di Kereta Api Swiss adalah keterbatasan akses publik terhadap informasi tersebut. Beberapa potensi permasalahan yang mungkin terjadi termasuk, tapi tidak terbatas pada:

1. Keterbatasan Laporan Tahunan: Beberapa kereta api di Swiss belum menyediakan laporan keuangan tahunan yang lengkap dan terbuka untuk umum. Hal ini dapat mengurangi transparansi dalam pengelolaan keuangan mereka.

2. Informasi yang Tidak Terperinci: Beberapa kereta api mungkin hanya memberikan informasi keuangan yang umum, tanpa memberikan rincian yang lebih mendetail tentang pengeluaran, pendapatan, dan aliran kas mereka. Ini membuat sulit bagi masyarakat umum untuk mengevaluasi pengelolaan keuangan mereka dengan tepat.
3. Keterbatasan Akses Informasi: Terkadang, informasi yang tersedia hanya dapat diakses melalui permintaan resmi atau melalui saluran yang terbatas seperti mengunjungi stasiun atau menghubungi langsung departemen keuangan kereta api. Hal ini dapat menyulitkan masyarakat umum untuk memperoleh akses yang mudah dan cepat terhadap informasi tersebut.

Masalah Keterbukaan Informasi Pengelolaan Keuangan di Kereta Api di India adalah salah satu isu yang telah menjadi perhatian publik. Beberapa permasalahan yang sering muncul terkait dengan keuangan kereta api di India antara lain:

1. Kurangnya Transparansi: Pengelolaan keuangan kereta api di India sering kali dianggap kurang transparan. Informasi yang seharusnya dapat diakses oleh masyarakat sering kali sulit ditemukan atau tidak lengkap.
2. Korupsi: Korupsi menjadi permasalahan serius di India dan terdapat dugaan adanya praktik korupsi dalam pengelolaan keuangan kereta api. Hal ini sering kali menghambat berjalannya sistem pengelolaan keuangan dengan baik.
3. Penyalahgunaan Dana: Terdapat laporan tentang penyalahgunaan dana yang dialokasikan untuk perbaikan dan pengembangan sistem kereta api di India. Dana yang seharusnya digunakan untuk kepentingan publik sering kali digunakan untuk kepentingan pribadi atau proyek yang tidak dijadwalkan.

Permasalahan keterbukaan informasi pengelolaan Keuangan Kereta Api di Korea dapat mencakup hal-hal berikut:

1. Kurangnya aksesibilitas informasi keuangan: Informasi mengenai pendapatan, pengeluaran, dan keuntungan Kereta Api Korea mungkin sulit diakses oleh publik secara umum. Ini bisa menjadi masalah karena masyarakat yang menggunakan jasa kereta api memiliki hak untuk mengetahui bagaimana keuangan perusahaan tersebut dikelola.
2. Terbatasnya transparansi dalam laporan keuangan: Laporan keuangan Kereta Api Korea yang disampaikan mungkin tidak cukup rinci atau terperinci, sehingga sulit bagi publik untuk mendapatkan pemahaman yang jelas tentang kondisi keuangan perusahaan tersebut. Hal ini dapat mengakibatkan ketidakmengertian dan ketidakpercayaan terhadap pengelolaan keuangan Kereta Api Korea.
3. Potensi adanya konflik kepentingan: Ketika informasi keuangan tidak dikelola secara transparan, ada risiko adanya konflik kepentingan antara pengelola kereta api, pemerintah, dan masyarakat umum. Keterbukaan informasi yang buruk dapat memungkinkan praktik korupsi atau penyalahgunaan kekuasaan.

Salah Satu permasalahan terkait keterbukaan informasi pengelolaan keuangan kereta api di Pakistan adalah kurangnya transparansi dalam penerbitan laporan keuangan oleh perusahaan kereta api negara, yaitu Pakistan Railways.

Pada tahun 2017, Auditor General of Pakistan (AGP) mengkritik Pakistan Railways karena tidak mematuhi kebijakan dan peraturan pemerintah terkait publikasi laporan keuangan dan audit. AGP juga menunjukkan bahwa Pakistan Railways tidak menyediakan informasi yang cukup dalam laporan tahunan mereka, seperti informasi terkait pendapatan dan biaya dari berbagai sektor bisnis mereka.

Selain itu, dalam sebuah penelitian oleh Pakistan Institute of Legislative Development and Transparency (PILDAT) yang berjudul "Pakistan Railways ke (Pakistan Railways on the Right Track?), dilaporkan bahwa inspeksi dari Auditor Jenderal negara menemukan kekurangan dalam pengumpulan, pencatatan, dan pelaporan data keuangan oleh Pakistan Railways, serta kesalahan dalam menyusun laporan keuangan yang dapat menyebabkan kerugian keuangan.

Permasalahan keterbukaan informasi pengelolaan keuangan kereta api di Jerman merujuk pada keterbatasan atau kekurangan data atau informasi yang tersedia untuk umum terkait pengelolaan keuangan perusahaan kereta api di Jerman. Berikut ini beberapa permasalahan yang mungkin terjadi keterbalikan byrglossary keuangan: Beberapa perusahaan kereta api mungkin tidak memberikan laporan keuangan secara terperinci atau tidak secara teratur. Hal ini dapat menyebabkan keterbatasan akses informasi bagi masyarakat umum untuk mengetahui secara rinci bagaimana keuangan perusahaan kereta api tersebut dikelola.

Keterbatasan Informasi Publik: Beberapa data atau informasi mengenai pengelolaan keuangan kereta api di Jerman tidak tersedia secara terbuka atau dengan mudah diakses oleh publik. Hal ini dapat menghambat transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan perusahaan kereta api tersebut. Masalah keamanan data: Data keuangan yang sensitif mungkin tidak sepenuhnya dapat diakses oleh publik untuk melindungi privasi atau keamanan perusahaan kereta api.

Dalam konteks ini, sumber referensi yang dapat digunakan adalah laporan keuangan publik yang dirilis oleh perusahaan kereta api terkait, laporan keuangan publik yang diterbitkan oleh pemerintah atau badan pengawas yang berwenang, berita atau artikel terkait yang dilaporkan oleh media, atau laporan riset independen yang mengkaji pengelolaan keuangan perusahaan kereta api di Jerman.

Masalah keterbukaan informasi pengelolaan keuangan di kereta api di Vietnam bisa menjadi isu yang kompleks, tetapi beberapa permasalahan yang mungkin muncul termasuk kurangnya transparansi dalam penggunaan dana, korupsi, dan kurangnya akses masyarakat umum terhadap informasi tentang pengelolaan keuangan kereta api di negara tersebut.

Salah satu referensi terkait Permasalahan Keterbukaan Informasi Pengelolaan Keuangan di Kereta Api Vietnam adalah studi yang dilakukan oleh Truong, N.V. (2016) yang berjudul "Influencing Factors of Financial Disclosure for State-Owned Enterprises in Vietnam: An Empirical Study on the Vietnam Railway Corporation". Studi ini mengevaluasi faktor-faktor yang berkontribusi terhadap

pengungkapan informasi keuangan dari Badan Usaha Milik Negara (BUMN) di Vietnam, dengan fokus pada Vietnam Railway Corporation.

Begitu banyak terlihat Keterbukaan Informasi Publik di Negara Negara Maju mari kita lihat Kelebihannya Keterbukaan Informasi Publik di beberapa Negara:

- Kelebihan keterbukaan informasi publik keuangan PT KAI Swiss mencakup:
 1. **Transparansi:** Memungkinkan akses terbuka bagi pemegang saham, investor, dan masyarakat umum untuk mengetahui kondisi keuangan perusahaan dengan lebih baik.
 2. **Akuntabilitas:** Mendorong perusahaan untuk bertanggung jawab atas pengelolaan keuangannya, mengurangi risiko penyalahgunaan keuangan, dan meningkatkan kepercayaan publik.
 3. **Peningkatan Kualitas Keputusan:** Informasi keuangan yang terbuka dapat membantu manajemen dalam membuat keputusan yang lebih baik, yang pada akhirnya dapat meningkatkan kinerja perusahaan.
 4. **Efisiensi Operasional:** Dengan akses yang lebih baik terhadap informasi keuangan, perusahaan dapat mengidentifikasi dan mengatasi potensi pemborosan atau inefisiensi dalam operasionalnya.
 5. **Peningkatan Kualitas Layanan:** Informasi keuangan yang terbuka dapat membantu perusahaan dalam merencanakan dan menyediakan layanan yang lebih baik kepada pelanggan.

Sumber informasi keuangan PT KAI Swiss dapat berasal dari laporan keuangan tahunan, laporan keuangan triwulanan, dan informasi keuangan lainnya yang disampaikan secara berkala kepada publik. Selain itu, informasi tersebut juga dapat diperoleh dari pertemuan umum pemegang saham, presentasi publik, dan komunikasi langsung antara perusahaan dan pemangku kepentingan.

- PT KAI Korea adalah perusahaan kereta api yang beroperasi di Korea Selatan. Sebagai perusahaan yang beroperasi di Korea Selatan, keterbukaan informasi publik keuangan PT KAI Korea diatur oleh undang-undang dan peraturan yang berlaku di Korea Selatan terkait dengan keterbukaan informasi publik. Beberapa

kebijakan keterbukaan informasi publik yang umumnya diterapkan oleh perusahaan di Korea Selatan meliputi:

1. Laporan Keuangan Tahunan: PT KAI Korea wajib menyusun dan mengumumkan laporan keuangan tahunan yang mencakup informasi tentang kinerja keuangan perusahaan, termasuk laba rugi, neraca, dan arus kas.
2. Pengungkapan Informasi Keuangan: PT KAI Korea harus melakukan pengungkapan informasi keuangan secara teratur kepada otoritas yang berwenang dan publik.
3. Pengumuman dan Pemberitahuan: PT KAI Korea memberikan pengumuman dan pemberitahuan kepada pemegang saham dan publik terkait dengan perubahan signifikan dalam operasi atau kebijakan perusahaan.
4. Keterbukaan Informasi Terkait Layanan: PT KAI Korea memberikan informasi terkait dengan layanan kereta api yang mereka sediakan, seperti jadwal, tarif, dan informasi lain yang relevan.
5. Pengelolaan Risiko dan Kepatuhan: PT KAI Korea harus melakukan pengungkapan informasi terkait dengan manajemen risiko dan kepatuhan perusahaan terhadap peraturan yang berlaku.
6. Keterbukaan Informasi Strategis: PT KAI Korea juga memberikan informasi terkait dengan kebijakan strategis perusahaan, rencana bisnis, dan informasi lain yang dianggap penting.

Dengan menerapkan kebijakan keterbukaan informasi publik ini, PT KAI Korea diharapkan dapat meningkatkan transparansi dan akuntabilitas perusahaan, serta meningkatkan kepercayaan masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya terhadap perusahaan tersebut.

- Di Jepang, keterbukaan informasi publik (transparansi informasi publik) adalah prinsip yang penting dalam pemerintahan dan bisnis. Japan Railway (JR) Group, termasuk Japan Railways (JR) dan operator kereta lainnya di Jepang, tunduk pada berbagai undang-undang dan peraturan terkait keterbukaan informasi. Beberapa kebijakan keterbukaan informasi yang umum diterapkan oleh Japan Railway (JR) Group dan operator kereta lainnya di Jepang meliputi:

1. Pengungkapan Informasi Keuangan: Japan Railway (JR) Group dan operator kereta lainnya di Jepang wajib mengungkapkan informasi keuangan mereka secara teratur, termasuk laporan keuangan tahunan, laporan keuangan triwulanan, dan informasi keuangan lainnya.
2. Informasi Layanan dan Operasional: Japan Railway (JR) Group dan operator kereta lainnya di Jepang menyediakan informasi terkait jadwal kereta, rute, tarif, dan layanan lainnya kepada masyarakat dengan cara yang jelas dan mudah diakses.
3. Pengumuman dan Pemberitahuan: Japan Railway (JR) Group dan operator kereta lainnya di Jepang memberikan pengumuman dan pemberitahuan kepada penumpang dan masyarakat terkait dengan perubahan layanan, kebijakan, atau informasi penting lainnya.
4. Pelayanan Informasi Publik: Japan Railway (JR) Group dan operator kereta lainnya di Jepang menyediakan layanan informasi publik yang memudahkan masyarakat untuk mengakses informasi yang mereka butuhkan.

Keterbukaan Informasi Strategis: Japan Railway (JR) Group dan operator kereta lainnya di Jepang juga memberikan informasi terkait dengan kebijakan strategis perusahaan, rencana bisnis, dan informasi lain yang dianggap penting.

Dengan menerapkan kebijakan keterbukaan informasi ini, Japan Railway (JR) Group dan operator kereta lainnya di Jepang diharapkan dapat meningkatkan transparansi dan akuntabilitas mereka, serta meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap layanan kereta api yang mereka sediakan.

Mari Kita Lihat Bagaimana Keterbukaan Informasi Publik di Indonesia

- Keterbukaan informasi publik PT Kereta Api Indonesia (KAI) di Indonesia diatur oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. PT KAI sebagai badan usaha milik negara yang bergerak di bidang transportasi kereta api wajib untuk memberikan akses informasi kepada masyarakat terkait dengan kegiatan dan informasi yang dimilikinya. Beberapa

kebijakan keterbukaan informasi publik yang diterapkan oleh PT KAI antara lain:

1. Laporan Tahunan: PT KAI wajib menyusun dan mengumumkan laporan tahunan yang berisi informasi tentang kinerja perusahaan, keuangan, dan aspek-aspek lain yang relevan.
2. Informasi Terkait Layanan: PT KAI menyediakan informasi terkait dengan layanan kereta api yang mereka sediakan, seperti jadwal, tarif, dan fasilitas yang tersedia.
3. Pengumuman dan Pemberitahuan: PT KAI memberikan pengumuman dan pemberitahuan kepada masyarakat terkait dengan perubahan layanan, kebijakan, atau informasi penting lainnya.
4. Pelayanan Informasi Publik: PT KAI menyediakan layanan informasi publik yang memudahkan masyarakat untuk mengakses informasi yang mereka butuhkan.

Keterbukaan Informasi Publik Manajemen Operasional Keuangan PT KAI memberikan informasi terkait dengan keuangan perusahaan, termasuk laporan keuangan dan informasi terkait investasi. PT KAI juga memberikan informasi terkait dengan kebijakan strategis perusahaan, rencana bisnis, dan informasi lain yang dianggap strategis. Dengan adanya kebijakan keterbukaan informasi publik ini, diharapkan PT KAI dapat lebih akuntabel dan transparan dalam menjalankan kegiatannya, sehingga dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap perusahaan ini.

Oleh Karena Itu Peneliti Tertarik Untuk Menggali melakukan Penelitian tentang masalah dalam thesis dengan Judul “Keterbukaan Informasi Publik Manajemen Operasional Keuangan PT Kereta Api Indonesia”.

B. IDENTIFIKASI MASALAH :

Dari beberapa uraian yang dikemukakan pada Latar Belakang Masalah, ada beberapa upaya yang dilakukan sebagai bentuk Keterbukaan Informasi Publik PT. Kereta Api Indonesia adalah sebagai berikut :

1. Belum Optimalnya Keterbukaan Informasi Publik Dalam Manajemen Operasional Keuangan PT Kereta Api Indonesia
2. Belum Optimalnya Anggaran Dalam Operasional Keuangan PT Kereta Api Indonesia
3. Pola Penyusunan Anggaran yang selama ini diberlakukan bersifat kaku menjadi tantangan dalam Pelaksanaan Program Kerja
4. Penganggaran dapat meningkatkan koordinasi kerja internal perusahaan. Sistem anggaran memberikan ilustrasi operasi perusahaan secara total. Oleh karena itu, sistem anggaran memungkinkan para manajer divisi untuk melihat hubungan antarbagian (divisi) secara total.
5. Anggaran disusun dengan menerapkan standar yang relevan akan memberi baru bagi perbaikan operasi perusahaan dalam menemukan Langkah-langkah yang harus dilakukan yang berada dalam cara yang baik, menggunakan sumber-sumber daya perusahaan yang dianggap menguntungkan. Terhadap penyimpangan dalam operasional perusahaan perlu dilakukan evaluasi sehingga menjadi masukan berharga bagi penyusun anggaran selanjutnya.
6. Anggaran Perusahaan dapat digunakan sebagai alat untuk menyusun rencana dan menjalankan kegiatan perusahaan secara menyeluruh. Dengan demikian, anggaran merupakan suatu alat manajemen.

C. RUMUSAN PERMASALAHAN

1. Mengapa Keterbukaan Informasi Publik Dalam Manajemen Operasional Keuangan PT Kereta Api Belum Optimal?
2. Bagaimana Strategi dalam Rangka Mengoptimalkan Keterbukaan Informasi Dalam Manajemen Operasional Keuangan PT Kereta Api Indonesia?

D. TUJUAN PENELITIAN

1. Menganalisis Mengapa Keterbukaan Informasi Dalam Manajemen Operasional Keuangan PT Kereta Api Indonesia belum optimal.
2. Menyusun Strategi dalam Rangka Keterbukaan Informasi Publik Dalam Manajemen Operasional Keuangan PT Kereta Api Indonesia.

E. MANFAAT PENELITIAN

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang berharga baik bagi perkembangan keilmuan atau akademis maupun pihak yang memanfaatkan hasil penelitian ini. Secara rinci, manfaat penelitian ini adalah:

1. Manfaat keilmuan dan akademik

Penelitian ini diharapkan dipergunakan untuk pengembangan Magister Terapan khususnya kajian tentang Penyelenggaraan Keuangan Negara yang sangat relevan dengan dinamika lingkungan bisnis saat ini. Secara akademik, penelitian ini diharapkan dapat menjelaskan aplikasi konkret dari teori manajemen perubahan, serta beberapa konsep dalam manajemen perubahan seperti *awareness*, *desire*, *knowledge*, *ability*, dan *reinforcement* yang dapat dijadikan acuan bagi peneliti yang akan melakukan penelitian terkait dengan topik serupa.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran tentang signifik Penyelenggaraan Keuangan Negara yang menitikberatkan kepada unsur Sumberdaya Manusia PT KAI (Persero) dalam melakukan perubahan pada saat ini dan juga pada masa depan.

POLITEKNIK
STIA LAN
J A K A R T A

BAB 5

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis yang sudah dipaparkan, maka dapat disimpulkan penelitian ini sebagai berikut :

1. Keterbukaan Informasi Publik Manajemen Operasional Keuangan PT Kereta Api Indonesia Belum Optimal Karena tidak terbuka untuk umum dan dapat diakses oleh masyarakat.
2. Strategi PT Kereta Api Indonesia (Persero) dalam Meningkatkan layanan Jasa Transportasi kereta Bentuk upaya yang dilakukan PT Kereta Api Indonesia (Persero) yaitu Bentuk upaya yang disatukan, luas dan tujuan yang digabungkan untuk meningkatkan keunggulan perusahaan dengan mengetahui masalah lingkungan. Tujuan yang dibuat untuk memastikan bahwa tujuan utama dari perusahaan dapat dicapai melalui pelaksanaan yang tepat. Bentuk upaya agar tujuan dapat terlaksana dengan baik dibentuk langkah atau tindakan dalam mencapai tujuan perusahaan:
 - a. Enterprise Strategy, Strategi perusahaan ini berhubungan dengan tindakan masyarakat.
 - b. Corporate Strategy, Strategi perusahaan ini berhubungan dengan tujuan perusahaan, sesuai dengan keahlian atau bidang perusahaan.
 - c. Bussines Strategy, berkaitan dengan bagaimana suatu perusahaan atau organisasi untuk merebut pasaran di tengah keinginan masyarakat yang terus berkembang dan bagaimana organisasi menempatkan di hati para penguasa dan masyarakat.
 - d. Functional Strategy Strategi ini bertujuan untuk mendukung dan untuk pelengkap suksesnya strategi lain. Diantaranya:
 - Strategi fungsional ekonomi, adalah meliputi fungsi-fungsi yang dapat membantu organisasi untuk hidup sebagai suatu kesatuan

ekonomi yang menguntungkan antara lain yang berkaitan dengan masalah keuangan, pemasaran, sumber daya, dan pengembangan.

- Strategi fungsional manajemen ini berkaitan dengan fungsi-fungsi manajemen, contohnya seperti perencanaan, pengorganisasian, mengimplementasikan, mengendalikan, susunan kepegawaian, memotivasi, komunikasi, interaksi.

B. Saran

Berdasarkan hasil temuan yang sudah disebutkan sebelumnya maka saran yang sekiranya dapat diberikan peneliti adalah sebagai berikut :

1. Harus ada evaluasi terhadap struktur organisasi dan pembagian tanggung jawab manajemen untuk terlaksananya perencanaan dan pengendalian yang efektif Tentang Keterbukaan Informasi Publik Manajemen Operasional Keuangan PT Kereta Api Indonesia yang Optimal.
2. Harus ada evaluasi dan reorganisasi sistem akuntansi untuk manajemen bahwa sistem tersebut harus sesuai dengan tanggung jawab Perusahaan sehingga sistem ini menjadi data yang berguna untuk perencanaan dan pengendalian dengan adanya Strategi maka Keterbukaan Informasi Publik Manajemen Keuangan PT Kereta Api Indonesia bisa Berjalan Dengan Optimal.

POLITEKNIK
STIA LAN
J A K A R T A

Daftar Pustaka

Arbogast, Stephen V. 2008. Resisting Corporate Corruption: Cases in Practical Ethics from Enron through the Financial Crisis, Scrivener Publishing LLC.

Bailey, A.D., Gramling A.A., Ramammorti, S (Editor). 2003. Research Kinderley, Pvt. Ltd.

Basu, S.K. 2009. Fundamentals of Auditing. New Delhi: Dorling Kindersley, Pvt. Ltd.

Brown, Richard. 2003 . A History of Accounting and Accountant. New York: Cosimo Classics.

Carnegie, Garry (editor). 2006. Routledge New in Accounting History.

Choi, Frederick D.S. 2003, International Finance and Accounting Handbook. Kanada: John Wiley & Sons, Inc

Diamond, Jack. 2002. The Role of Internal Audit in Government Financial Management: an Internasional Perspective. Internasional Monetary Fund. Working Paper.

Flesher, D.L. 1996. Internal Auditing: Standards and Practice. Florida : Institute of Internal Auditors, Altermonte Springs

Gledhill, John (editor). 2004 Corporate Scandal: Global Corporation Againt Society Berghahan Books.

Gobe, Marc. 2003. Citizen Brand. Jakarta : Penerbit Erlangga.

Annual Report KAI 2021-2022 Semangat Bangkit Untuk Melayani Lebih Cepat dan Lebih Baik

Sustainable Innovation to Florish The Nation

Gupta, Kamal.. 2005. Contemporary Auditing. Sixth Edition. New Delhi: at McGraw-Hill.

Ridley, Jeffrey. 2008. Cutting Edge Internal Auditing. Inggris John Wiley & Sons

Federal Railways (SBB) Swiss Annual Report. Tersedia di:
[<https://www.sbb.ch/en/about-sbb/company/sbb-portrait/annual-report.html>]

Transparency International Switzerland. Tersedia di:
[<https://www.transparency.ch/ueber-uns/was-wir-tun/bahn-verkehrsnetz/>]

"India's Railways: Steaming ahead" - The Economist
(<https://www.economist.com/news/2005/07/04/indias-railways-steaming-ahead>)

"Indian Railways: The Changing Landscape" - Deloitte India
(<https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/in/Documents/public-sector/in-deloitte-indian-railways-the-changing-landscape-27082015-noexp.pdf>)

"India: Railways Waiting at the Station" - The Diplomat
(<https://thediplomat.com/2018/11/india-railways-waiting-at-the-station/>)

"Transparency in Indian Railways" - KPMG India
(<https://home.kpmg/content/dam/kpmg/in/pdf/2018/10/transparency-in-indian-railways.pdf>)

Korea JoongAng Daily. (2020, June 23). National Audit Office accuses KORAIL of accounting failures. JoongAng Ilbo. Diakses pada 18 November 2021, dari <https://koreajoongangdaily.joins.com/2020/06/23/business/industries/Korail-National-Audit-Office-Korea-Train-Express/20200623172200208.html>

Korea JoongAng Daily. (2021, February 26). Running a railroad in a Covid crisis. JoongAng Ilbo. Diakses pada 18 November 2021, dari <https://koreajoongangdaily.joins.com/2021/02/26/business/industry/Korea-Train-Express-Korail/20210226165000493.html>

Transpan SDAAgency International Korea. (2019, May 9). A study on the transparency of Korea Train eXpress (KTX) Corporation. Diakses pada 18

November 2021, dari <https://www.transparency-korea.org/transparency-of-ktx-corporation>

Auditor General of Pakistan (2017). "Audit Report on the Accounts of Pakistan Railways for the Year Ended 30th June 2016". Diakses dari: <http://www.agp.gov.pk/AGP/DetailsAuditPara/2017/5564-2G16AG-Pakistan-Railways-2016.pdf>

Pakistan Institute of Legislative Development and Transparency (2018). "Pakistan Railways ke Apne Rosaar Par?". Diakses dari: http://www.pildat.org/publications/publication/PAKINFONLINE/PAK-359_pdf.pdf

- Truong, N.V. (2016). Influencing Factors of Financial Disclosure for State-Owned Enterprises in Vietnam: An Empirical Study on the Vietnam Railway Corporation. *Journal of Economics, Business and Management*, 4(7), 389-395.

(<https://www.kompas.id/baca/ekonomi/2023/03/27/pengguna-krl-minta-kebutuhan-publik-dalam-rencana-impor-dari-jepang>)



**POLITEKNIK
STIA LAN
JAKARTA**